KAJIAN MULTIDISIPLIN ILMU
(KAMI)

Vol. 01, No. 02, November 2026, Pp: 69 – 83
e-ISSN: 3164-6980
Available online at https://journals.vmpofficial.com/index.php/KAMI/

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN DI KECAMATAN KAMAL KABUPATEN BANGKALAN

Eny Kurniawati[1(*)], Supriyanto[2], Sri Juni Woro Astuti[3]
Universitas Wijaya Putra, Surabaya, Indonesia[123]
enykurniawati1979@gmail.com[1]

Received: November 2026
Revised: November 2026
Accepted: November 2026

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana pemerintah daerah menerapkan kebijakannya dalam meningkatkan kesetaraan akses pendidikan di Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Selain itu, penelitian ini juga mencoba menemukan faktor yang mendukung serta menghambat dalam proses penerapan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, Teknik mengumpulkan data mencakup observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen. Pemilihan peserta dilakukan dengan cara purposive sampling karena mereka memiliki pengetahuan dan peran dalam isu-isu yang sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III terdiri dari empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat indikator tersebut digunakan untuk mengevaluasi bagaimana pemerintah daerah menerapkan kebijakannya agar akses pendidikan menjadi lebih adil bagi semua. Penelitian ini memfokuskan pada aspek komunikasi kebijakan, tersedianya dana dan tenaga pengajar, fasilitas pendidikan, komitmen dari pihak yang menerapkan kebijakan, serta kerja sama antarinstansi terkait. Kesetaraan dalam akses pendidikan diharapkan bisa tercapai dengan meningkatkan kualitas layanan pendidikan, menyebarluaskan fasilitas sekolah secara merata, memaksimalkan program bantuan pendidikan, serta memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

Keywords: Implementasi Kebijakan, Pemerintah Daerah, Akses Pendidikan yang Setara, Kecamatan Kamal

(*) Corresponding Author: Kurniawati, enykurniawati1979@gmail.com

How to Cite: Kurniawati, E., Supriyanto, & Astuti, S. J. W. (2026). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN DI KECAMATAN KAMAL KABUPATEN BANGKALAN. *Kajian Multidisiplin Ilmu (KAMI), 01*(02), 69-83.

INTRODUCTION

Pendidikan adalah elemen krusial dalam proses pengembangan sumber daya manusia serta peningkatan mutu kehidupan individu. Melalui pendidikan, individu memiliki kesempatan untuk mengasah bakat, wawasan, dan kemampuan guna mengatasi beragam rintangan yang ada dalam hidup. Pemerataan akses pendidikan menjadi tujuan penting dalam pembangunan nasional karena setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun kondisi geografis. Ini sejalan dengan UUD RI 1945 Pasal 31 Ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menerima pendidikan. UNESCO (2023) melalui Global Education Monitoring Report menjelaskan bahwa pemerataan dan inklusi

pendidikan merupakan aspek penting dalam mewujudkan pendidikan berkualitas, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Dengan demikian, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memainkan fungsi penting dalam mencapai keseimbangan pendidikan melalui penyediaan fasilitas dan infrastruktur, pengajar, dukungan pendidikan, serta pemajuan mutu pelayanan. Setiawan et al. (2024) dalam penelitian berjudul Pemerataan Akses Pendidikan menjelaskan bahwa pemerataan pendidikan membutuhkan pendekatan menyeluruh yang memperhatikan ketersediaan sekolah, kualitas tenaga pendidik, fasilitas pendidikan, serta kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah.

Kabupaten Bangkalan sebagai salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan bagi masyarakatnya. Salah satu wilayah yang menarik untuk dikaji adalah Kecamatan Kamal. Berdasarkan publikasi BPS Kabupaten Bangkalan dalam Kecamatan Kamal Dalam Angka 2024, data tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat 10 desa yang memiliki fasilitas Sekolah Dasar (SD), 5 desa memiliki fasilitas Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 1 desa memiliki fasilitas Sekolah Menengah Atas (SMA). Data tersebut menunjukkan adanya perbedaan persebaran fasilitas pendidikan berdasarkan wilayah administratif. Namun, ketersediaan sekolah belum tentu menjamin seluruh masyarakat memperoleh akses pendidikan yang setara. Beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan meliputi jarak tempat tinggal dengan sekolah, keterbatasan sarana dan prasarana, ketersediaan tenaga pendidik, serta kondisi ekonomi keluarga. Penelitian Taufiq et al. (2023) mengenai zonasi sekolah dan pemerataan akses pendidikan di Kota Parepare menunjukkan bahwa aspek geografis dan persebaran sekolah memiliki peran penting dalam menentukan kemudahan masyarakat memperoleh akses pendidikan. Dengan demikian, pemerataan pendidikan di Kecamatan Kamal perlu dikaji berdasarkan kondisi fasilitas dan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.

Selain faktor geografis, kondisi sosial ekonomi masyarakat juga memengaruhi pemerataan akses pendidikan. Keterbatasan ekonomi keluarga dapat menghambat pemenuhan kebutuhan pendidikan anak, seperti biaya transportasi, seragam, buku, dan perlengkapan sekolah lainnya. World Bank (2023) dalam laporan Indonesia Economic Prospects: The Invisible Toll of COVID-19 on Learning menguraikan bahwa peserta didik dari keluarga miskin mengalami pengaruh ketertinggalan pembelajaran yang lebih besar dibandingkan peserta didik dari keluarga yang lebih mampu. Fatin (2022) dalam riset berjudul Penerapan Kebijakan Pemerataan Pendidikan bagi Anak Miskin di RA Al-Amin, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman juga menemukan bahwa keterbatasan ekonomi orang tua menjadi salah satu aspek yang melatarbelakangi perlunya kebijakan pemerataan pendidikan. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komitmen pelaksana, kompetensi tenaga pendidik, ketersediaan asal daya, dan dukungan masyarakat. Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan dianalisis memakai teori George C. Edward III yang meliputi empat aspek, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut berhubungan dengan penyampaian informasi kebijakan, ketersediaan anggaran dan fasilitas, komitmen pelaksana, serta koordinasi dan pembagian tugas dalam menjalankan kebijakan pendidikan.

Pelaksanaan kebijakan pemerataan akses pendidikan di Kecamatan Kamal membutuhkan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bangkalan, perangkat daerah yang membidangi pendidikan, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, pihak sekolah, dan masyarakat. Koordinasi diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan, mengetahui kendala yang dihadapi masyarakat, serta menentukan solusi yang sesuai dengan kondisi wilayah. Fauziah & Permana (2022) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa Pemerataan Akses Pendidikan Sistem Informasi Manajemen pada Lembaga

Pendidikan Islam menunjukkan bahwa memastikan pemerataan pendidikan memerlukan dukungan dari sistem informasi, infrastruktur yang memadai, serta perencanaan program yang baik. Di samping itu, pentingnya pengawasan dan evaluasi terbukti penting untuk memastikan bahwa program pendidikan dapat berjalan selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dan dapat menjangkau sasaran yang tepat. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya serta situasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerataan akses pendidikan tidak hanya bergantung pada ketersediaan sekolah saja, namun juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi, distribusi tenaga pengajar, kolaborasi, dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan dari pemerintah daerah. Walaupun statistik BPS tahun 2024 memberikan informasi tentang sebaran fasilitas pendidikan di Kecamatan Kamal, namun data tersebut belum memberikan gambaran yang lengkap mengenai kemudahan akses masyarakat menuju sekolah, penyebaran tenaga pendidik, pelaksanaan bantuan pendidikan, serta kerjasama antara berbagai instansi dalam menangani isu-isu pendidikan. Dengan demikian, perlu dilaksanakan penelitian tambahan untuk memahami secara langsung kondisi pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pemerataan Akses Pendidikan di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan" penting untuk dilakukan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan pemerintah setempat dijalankan dalam upaya meningkatkan pemerataan akses pendidikan, menemukan faktor-faktor yang memfasilitasi serta menghalangi pelaksanaan kebijakan, dan juga menganalisis langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah dalam menghadapi isu pendidikan di Kecamatan Kamal. Fokus dari penelitian ini adalah pada empat elemen implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, yaitu komunikasi, alokasi sumber daya, sikap, dan struktur organisasi. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dan berfungsi sebagai bahan evaluasi serta masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk menciptakan kebijakan pendidikan yang lebih efektif, inklusif, dan adil, sehingga seluruh masyarakat di Kecamatan Kamal mendapatkan peluang yang setara dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas dan memadai.

METHODS

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Riset ini memakai jenis penelitian deskriptif dengan strategi kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam penerapan kebijakan pemerintah daerah dalam menaikkan pemerataan akses pendidikan di Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Menurut Sugiyono (2022), penelitian kualitatif dipakai untuk meneliti objek dalam kondisi alamiah. Sementara itu, Moleong (2017) menguraikan bahwa penelitian kualitatif bermaksud memahami gejala secara holistik melalui deskripsi kata-kata. Data penelitian didapatkan melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi untuk mengetahui tahapan pelaksanaan kebijakan serta aspek pendukung dan penghambat pemerataan akses pendidikan.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, di Provinsi Jawa Timur. Pemilihan tempat penelitian diambil berdasarkan pentingnya distribusi akses pendidikan untuk mendukung perbaikan kualitas sumber daya manusia di area ini. Kecamatan Kamal dipilih karena relevansinya untuk mengeksplorasi cara pemerintah daerah menerapkan kebijakan dalam memberikan kesempatan pendidikan yang adil

kepada masyarakat. Lebih lanjut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi situasi akses pendidikan, ketersediaan sarana pendidikan, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pendidikan di Kecamatan Kamal.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah batasan masalah yang digunakan untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian, sehingga tidak meny偏ang dari tujuan yang telah ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan pemerintah daerah diterapkan dalam usaha mempromosikan pemerataan akses pendidikan di Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan ini, penelitian ini merujuk pada teori implementasi kebijakan publik yang diusulkan oleh George C. Edward III yang mencakup empat indikator, yaitu:

1. Komunikasi
   Komunikasi merujuk pada cara pemerintah daerah menyampaikan informasi terkait kebijakan dan program pendidikan kepada semua pihak yang terlibat. Aspek ini meliputi kejelasan informasi, cara penyampaian kebijakan, serta konsistensi dalam komunikasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat.
2. Sumber Daya
   Sumber daya berkaitan dengan ketersediaan berbagai elemen yang dibutuhkan dalam penerapan kebijakan pendidikan. Aspek ini melibatkan ketersediaan dana, tenaga pengajar, infrastruktur pendidikan, serta fasilitas pendukung lain yang diperlukan untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan.
3. Disposisi
   Disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan tanggung jawab individu yang menjalankan program pendidikan. Aspek ini mengedepankan kesungguhan pemerintah daerah dan pihak lain yang terlibat dalam melaksanakan kebijakan serta memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat.
4. Struktur Birokrasi
   Struktur birokrasi menyangkut pembagian tugas, koordinasi, dan prosedur kerja di antara instansi dalam melaksanakan kebijakan pendidikan. Aspek ini mencakup koordinasi antara pemerintah daerah, dinas pendidikan, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta lembaga pendidikan..

Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam studi ini terdiri dari dua kategori, yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber utamanya melalui wawancara dan observasi di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan dari individu atau lembaga yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan pendidikan di Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, termasuk Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Pemerintah Kecamatan Kamal, kepala sekolah atau perwakilan dari lembaga pendidikan, guru atau pengajar, orang tua siswa, serta masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan akses pendidikan. Di sisi lain, data sekunder adalah informasi yang didapat secara tidak langsung melalui berbagai dokumen dan sumber tulisan yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, sejumlah peraturan dan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pendidikan, informasi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan, data tentang jumlah sekolah, siswa, dan pengajar, dokumen program pendidikan dari pemerintah daerah, serta berbagai jurnal akademis, buku, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema penelitian.

Teknik Penentuan Informan

Penetapan informan dalam studi ini dilakukan dengan metode purposive sampling, yang merupakan teknik pemilihan informan berdasarkan pertimbangan khusus yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari penelitian. Informan dipilih berdasarkan wawasan, pengalaman, serta partisipasi mereka dalam implementasi kebijakan pendidikan di Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan.

Adapun informan yang direncanakan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1.
Informan

No	Informan	Informasi yang Dibutuhkan
1	Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan	Kebijakan dan program pemerataan pendidikan
2	Pemerintah Kecamatan Kamal	Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di wilayah kecamatan
3	Kepala sekolah	Pelaksanaan kebijakan pendidikan di sekolah
4	Guru	Kondisi pembelajaran dan ketersediaan tenaga pendidik
5	Orang tua peserta didik	Kemudahan dan hambatan memperoleh pendidikan
6	Masyarakat	Persepsi terhadap pemerataan akses pendidikan

Jumlah informan dapat disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dan kecukupan informasi yang diperoleh di lapangan. Pengumpulan data dapat dihentikan apabila informasi yang diperoleh telah memadai dan tidak ditemukan informasi baru yang relevan.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi
   Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati kondisi akses pendidikan di Kecamatan Kamal, seperti ketersediaan sarana dan prasarana sekolah, kondisi lingkungan pendidikan, kemudahan masyarakat dalam menjangkau sekolah, serta kondisi pelayanan pendidikan. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi pemerataan akses pendidikan di lokasi penelitian.
2. Wawancara
   Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui kegiatan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memiliki pedoman pertanyaan, tetapi tetap memberikan kesempatan kepada informan untuk menyampaikan informasi secara lebih luas. Wawancara ditujukan kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, pemerintah Kecamatan Kamal, kepala sekolah, guru, orang tua peserta didik, dan masyarakat untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan, hambatan, serta upaya pemerintah dalam meningkatkan pemerataan akses pendidikan.
3. Dokumentasi
   Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto kondisi sekolah, data jumlah sekolah, jumlah peserta didik, jumlah tenaga

pendidik, dokumen kebijakan pendidikan, laporan program pemerintah, serta dokumen lain yang dapat mendukung hasil penelitian.

RESULTS & DISCUSSION

Results

Hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan pemerataan akses pendidikan di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan dianalisis menggunakan teori George C. Edward III. Teori tersebut mencakup empat indikator utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi adalah elemen krusial dalam pelaksanaan kebijakan publik. Keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada seberapa efektif informasi tentang kebijakan tersebut disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya. Dalam konteks distribusi akses pendidikan di Kecamatan Kamal, komunikasi berhubungan dengan transfer informasi mengenai program pendidikan yang ditawarkan pemerintah daerah kepada lembaga pendidikan, tenaga pengajar, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat. Pemerintah daerah melalui lembaga yang menangani pendidikan wajib memastikan bahwa informasi soal program pendidikan dapat diakses dan dipahami oleh semua pihak yang berinteraksi. Informasi tersebut dapat meliputi program bantuan pendidikan, kebijakan wajib belajar, peningkatan sarana sekolah, serta upaya peningkatan kualitas pengajaran. Berdasarkan fokus studi, komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan dapat dianalisis dari tiga sudut pandang, yaitu penyampaian informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi komunikasi. Penyampaian informasi perlu dilakukan agar masyarakat mengetahui program pendidikan yang ada. Kejelasan informasi sangat penting untuk mencegah terjadinya salah pengertian dalam penerapan program. Di sisi lain, konsistensi dalam komunikasi sangat diperlukan agar kebijakan dapat diimplementasikan secara berkelanjutan. Dengan begitu, komunikasi menjadi aspek yang sangat penting untuk mendukung pemerataan akses pendidikan, karena masyarakat perlu menyadari hak, kesempatan, dan program pendidikan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya adalah elemen kunci yang memengaruhi suksesnya implementasi kebijakan. Kebijakan di sektor pendidikan tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh tenaga kerja, dana, serta fasilitas yang mencukupi. Untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan di Kecamatan Kamal, sumber daya dapat dilihat dari keberadaan tenaga pengajar, dana pendidikan, infrastruktur sekolah, dan fasilitas pendukung proses belajar. Pertama, sumber daya manusia berkaitan dengan jumlah guru dan staf pendidikan. Adanya tenaga pengajar yang memadai dan memiliki keahlian sesuai spesialisasi mereka sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Kedua, aspek anggaran terkait dengan kemampuan pemerintah setempat untuk menyediakan dana guna menjalankan berbagai program pendidikan. Dana ini diperlukan untuk mendukung pembangunan fasilitas sekolah, pemeliharaan infrastruktur, dan pelaksanaan program bantuan pendidikan. Ketiga, infrastruktur pendidikan adalah elemen yang mendukung terciptanya suasana belajar yang baik. Keberadaan ruang kelas, perpustakaan, fasilitas sanitasi, dan alat pembelajaran sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Keempat, aksesibilitas pendidikan ada hubungannya dengan kemudahan masyarakat dalam mengakses sekolah. Aspek jarak, transportasi, dan kondisi ekonomi keluarga harus mendapat perhatian dari pemerintah daerah agar semua anak usia sekolah

memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Berdasarkan elemen-elemen tersebut, sumber daya menjadi salah satu indikator utama untuk mengevaluasi sejauh mana pemerintah daerah dapat mendukung pemerataan akses pendidikan di Kecamatan Kamal.

Disposisi (*Disposition*)

Disposisi adalah sikap, niat, dan kesiapan para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan. Dalam penerapan kebijakan pendidikan, disposisi terkait dengan tanggung jawab pemerintah daerah serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. Pelaksanaan kebijakan untuk memperluas akses pendidikan memerlukan komitmen dari pemerintah daerah, khususnya lembaga yang menangani bidang pendidikan. Komitmen ini dapat terwujud lewat pelaksanaan program-program pendidikan, pengawasan terhadap lembaga-lembaga pendidikan, serta usaha untuk mengatasi berbagai rintangan yang dihadapi masyarakat. Selain dari pemerintah daerah, kepala sekolah serta guru juga memiliki peran fundamental dalam mendukung keberhasilan kebijakan pendidikan. Sikap profesional, rasa tanggung jawab, dan perhatian terhadap kebutuhan siswa merupakan bagian integral dari pelaksanaan kebijakan di tingkat sekolah. Disposisi juga bisa ditentukan berdasarkan respon pemerintah terhadap masalah yang diajukan oleh masyarakat. Pemerintah daerah harus peka terhadap kelompok masyarakat yang menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan, terutama bagi keluarga dengan keterbatasan finansial. Dengan demikian, komitmen dan tanggung jawab dari para pelaksana kebijakan menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa program pemerataan pendidikan tidak hanya berlangsung secara administratif, tetapi juga memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berhubungan dengan pembagian peran, hak, pengaturan, serta prosedur dalam implementasi kebijakan publik. Dalam konteks kebijakan untuk meratakan akses pendidikan, keberadaan struktur birokrasi sangat penting agar setiap lembaga yang terlibat dapat melaksanakan peran dan tanggung jawab mereka dengan tegas. Implementasi kebijakan pendidikan di Kecamatan Kamal memerlukan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bangkalan, instansi terkait pendidikan, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta lembaga pendidikan. Kerjasama ini diperlukan guna mengenali kebutuhan pendidikan masyarakat, menyampaikan informasi mengenai program pemerintah, dan menyelesaikan isu-isu yang berhubungan dengan akses pendidikan. Selain kerjasama, pembagian peran dan hak juga merupakan elemen krusial. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pengelolaan urusan pendidikan sesuai dengan haknya, sementara itu pemerintah kecamatan dan desa dapat memberikan dukungan melalui kerjasama, penyampaian informasi, serta membantu kebutuhan masyarakat. Struktur birokrasi yang jelas akan membantu mencegah tumpang tindih wewenang dan meningkatkan efektivitas implementasi program pendidikan. Oleh karena itu, kerjasama antar lembaga harus dilaksanakan secara berkelanjutan agar sasaran pemerataan akses pendidikan di Kecamatan Kamal bisa terwujud.

Discussion

Pembahasan dalam studi ini dilakukan dengan mengaitkan temuan penelitian dengan teori pelaksanaan kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Teori ini menyatakan bahwa kesuksesan pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat elemen inti, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi.

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pemerataan Akses Pendidikan

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pemerataan Akses Pendidikan merupakan rangkaian tindakan dari sejumlah kebijakan dan program yang dirancang untuk menawarkan kesempatan belajar yang merata kepada semua lapisan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi atau program pemerintah, namun juga dipengaruhi oleh cara pelaksanaannya di situasi nyata. Dalam mengevaluasi implementasi kebijakan ini, studi ini memanfaatkan teori dari George C. Edward III yang menyoroti empat elemen kunci, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pemanfaatan teori ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Sitorus (2019) dengan judul Pengaruh Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi terhadap Implementasi Kebijakan Pendidikan. Temuan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa keempat variabel dalam teori Edward III berpengaruh terhadap implementasi pendidikan. Komunikasi memiliki pengaruh yang signifikan, sementara sumber daya dan struktur birokrasi memberikan pengaruh yang cukup, sedangkan disposisi menunjukkan pengaruh yang lebih rendah dalam penelitian itu. Hasil ini menegaskan bahwa untuk mencapai sukses dalam implementasi kebijakan pendidikan, diperlukan keselarasan antara penyampaian informasi, ketersediaan sumber daya, komitmen para pelaksana, serta adanya mekanisme birokrasi yang terdefinisi dengan jelas (Sitorus, 2019). Mengacu pada kerangka teori tersebut, pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesetaraan akses pendidikan di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan dapat dianalisis melalui empat aspek berikut.

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Berdasarkan Aspek Komunikasi

Menurut George C. Edward III, komunikasi adalah salah satu elemen kunci yang mempengaruhi suksesnya pelaksanaan kebijakan. Komunikasi berhubungan dengan cara penyampaian informasi kebijakan dari mereka yang membuat kebijakan kepada pihak pelaksana dan kelompok sasaran. Informasi yang disampaikan perlu jelas, konsisten, dan mudah dipahami oleh semua pihak yang berkenaan agar kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan. Dalam konteks distribusi akses pendidikan di Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, komunikasi memainkan peran vital dalam menyampaikan informasi tentang kebijakan dan program pendidikan kepada masyarakat. Pemerintah daerah melalui lembaga yang menangani pendidikan harus memastikan bahwa informasi tentang penerimaan siswa baru, bantuan pendidikan, beasiswa, dan program peningkatan layanan pendidikan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Penyampaian informasi ini tidak hanya boleh dilakukan melalui institusi pendidikan, tetapi juga harus melibatkan pemerintah kecamatan, pemerintahan desa, tokoh masyarakat, dan berbagai media informasi yang mudah dijangkau. Langkah ini diperlukan agar informasi dapat mencapai masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses informasi, terutama bagi keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi yang kurang baik.

Pentingnya komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan diperkuat oleh penelitian Meiynana & Machdum (2020) berjudul Potensi Pendukung Pelaksanaan Program Indonesia Pintar: Studi Kasus di Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa keberhasilan dalam melaksanakan Program Indonesia Pintar sangat tergantung pada adanya komunikasi yang baik, koordinasi yang teratur, ketersediaan sumber daya yang cukup, dan birokrasi yang mampu menjalankan fungsi serta tanggung jawabnya dengan baik. Temuan ini menyoroti bahwa komunikasi serta koordinasi antar berbagai pihak merupakan elemen krusial dalam

memastikan program pendidikan menjangkau sasaran yang tepat. Temuan tersebut memiliki relevansi yang besar dengan penelitian ini, karena untuk mencapai pemerataan akses pendidikan di Kecamatan Kamal, diperlukan juga penyampaian informasi yang efektif antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Jika komunikasi tidak berjalan dengan baik, ada risiko masyarakat tidak akan mendapatkan informasi tentang program pendidikan yang sebenarnya bisa mereka manfaatkan. Oleh karena itu, efektivitas komunikasi harus dinilai dari aspek kejelasan informasi, media yang digunakan untuk penyampaian, frekuensi sosialisasi, dan kemampuan pemerintah untuk menjangkau kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan. Dengan demikian, komunikasi yang efektif diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak serta kesempatan dalam mendapatkan pendidikan dan juga mendukung pelaksanaan kebijakan pemerataan akses pendidikan di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Berdasarkan Aspek Sumber Daya

Sumber daya adalah elemen krusial yang memengaruhi kemampuan pemerintah dalam menerapkan kebijakan. George C. Edward III berpendapat bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan bukan hanya tergantung pada kejelasan informasi, tetapi juga pada adanya sumber daya yang mendukung pelaksanaan tersebut. Sumber daya ini mencakup tenaga kerja manusia, alokasi anggaran, informasi, wewenang, serta fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan. Dalam studi tentang pemerataan akses pendidikan di Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, aspek sumber daya dapat dilihat melalui ketersediaan guru, dukungan anggaran pendidikan, keadaan infrastruktur sekolah, serta fasilitas yang mendukung proses belajar. Ketersediaan sumber daya yang cukup menjadi salah satu syarat agar masyarakat dapat menikmati layanan pendidikan dengan adil dan berkualitas.

Dari aspek asal daya manusia, pemerataan distribusi tenaga pendidik perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah. Jumlah dan kompetensi guru yang memadai dibutuhkan untuk menopang tahapan pembelajaran di setiap lembaga pendidikan. Ketimpangan distribusi tenaga pendidik berpotensi mengakibatkan perbedaan kualitas pelayanan pendidikan antarsekolah. Selanjutnya, dukungan anggaran diperlukan untuk memenuhi kebutuhan operasional pendidikan, memperbaiki fasilitas sekolah, menaikkan kompetensi tenaga pendidik, serta melaksanakan beragam program yang berorientasi pada kenaikan akses pendidikan. Sarana dan prasarana seperti ruang kelas, perpustakaan, fasilitas sanitasi, dan media pembelajaran juga perlu diperhatikan agar seluruh peserta didik memperoleh lingkungan belajar yang layak. Riset Meiynana & Machdum (2020) mengenai pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon memperlihatkan bahwa ketersediaan sumber daya yang memadai menjadi salah satu aspek pendukung keberhasilan pelaksanaan program. Penelitian tersebut juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaan program pendidikan, terutama dalam menyajikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Di samping itu, penelitian Radja, Tamelan, & Balun (2026) yang berjudul Penerapan Program Kartu Indonesia Pintar dalam Meningkatkan Akses Pendidikan menguraikan bahwa Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan partisipasi pendidikan dan pengurangan angka putus sekolah, terutama bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Akan tetapi, penelitian tersebut juga menemukan kendala berupa ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, lemahnya pengawasan penggunaan dana, serta keterbatasan infrastruktur. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberadaan program bantuan pendidikan perlu didukung oleh pengelolaan sumber daya dan pengawasan yang memadai agar manfaatnya dapat dirasakan oleh kelompok sasaran.

Berdasarkan riset terdahulu tersebut, aspek asal daya dalam pemerataan akses pendidikan di Kecamatan Kamal perlu dianalisis tidak hanya berdasarkan jumlah anggaran atau fasilitas yang tersedia, tetapi juga berdasarkan ketepatan distribusi dan pemanfaatannya. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa sumber daya pendidikan dialokasikan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah dan lembaga pendidikan. Oleh sebab itu, pemerataan sumber daya menjadi salah satu aspek penting dalam memperkecil kesenjangan pelayanan pendidikan dan menyajikan kesempatan yang lebih setara bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan.

Penerapan Kebijakan Pemerintah Daerah Berdasarkan Aspek Disposisi

Disposisi merupakan aspek yang berhubungan dengan sikap, komitmen, dan kesediaan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Menurut George C. Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh sikap pelaksana terhadap kebijakan yang dijalankan. Pelaksana yang mempunyai komitmen dan pemahaman terhadap sasaran kebijakan cenderung lebih mampu menjalankan program sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan kebijakan pemerataan akses pendidikan di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, disposisi tampak jelas dari komitmen pemerintah daerah dan seluruh pihak yang terlibat dalam menyajikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Komitmen tersebut dapat diwujudkan melalui keseriusan dalam menjalankan program pendidikan, memperhatikan kebutuhan masyarakat, menjalankan pengawasan, serta memastikan bantuan pendidikan diberikan kepada peserta didik yang memenuhi kriteria.

Selain pemerintah daerah, pihak sekolah juga memiliki peran penting dalam menopang pemerataan akses pendidikan. Kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan perlu memperlihatkan sikap profesional, tanggung jawab, serta memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh peserta didik tanpa membedakan latar belakang sosial maupun ekonomi. Riset Sitorus (2019) menunjukkan bahwa aspek disposisi memiliki hubungan dengan implementasi kebijakan pendidikan, meskipun tingkat pengaruhnya dalam penelitian tersebut relatif lebih rendah dibandingkan peubah komunikasi, asal daya, dan struktur birokrasi. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa sikap dan komitmen pelaksana tetap menjadi salah satu unsur yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan.

Relevansi aspek disposisi juga dapat dilihat dari penelitian Marina (2016) mengenai implementasi Program Kartu Sehati di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. Penelitian tersebut menemukan bahwa pelaksanaan program belum terbaik, terutama dalam aspek kepesertaan, sosialisasi, dan pendistribusian. Penelitian tersebut juga mengidentifikasi komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi sebagai faktor yang memengaruhi implementasi program. Meskipun objek penelitiannya bukan kebijakan pendidikan, penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai pentingnya pelaksanaan program pemerintah yang berorientasi pada kelompok masyarakat sasaran di wilayah Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan uraian tersebut, disposisi dalam penelitian ini diarahkan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah dan pelaksana kebijakan memiliki komitmen dalam menaikkan pemerataan akses pendidikan. Aspek yang perlu diperhatikan meliputi tanggung jawab pelaksana, kesediaan menjalankan kebijakan, kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat, serta konsistensi dalam memberikan pelayanan pendidikan. Oleh sebab itu, disposisi yang positif dan didukung oleh profesionalitas pelaksana diharapkan dapat memperkuat keberhasilan kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan pemerataan akses pendidikan di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Berdasarkan Aspek Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan aspek yang berkaitan dengan pembagian tugas, kewenangan, prosedur kerja, serta koordinasi antarinstansi dalam melaksanakan kebijakan. Menurut George C. Edward III, struktur birokrasi yang baik dibutuhkan untuk memastikan bahwa setiap pelaksana memahami tugas dan tanggung jawabnya akibatnya kebijakan dapat dijalankan secara terarah dan berdaya guna. Dalam pelaksanaan kebijakan pemerataan akses pendidikan di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, struktur birokrasi dapat dilihat melalui hubungan kerja antara pemerintah Kabupaten Bangkalan, perangkat daerah yang membidangi pendidikan, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan lembaga pendidikan. Setiap pihak memiliki peran yang perlu disesuaikan dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui perangkat daerah yang membidangi pendidikan memiliki peran dalam merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan program pendidikan sesuai kewenangannya. Sementara itu, pemerintah Kecamatan Kamal dan pemerintah desa dapat mendukung penyampaian informasi, pendataan kebutuhan masyarakat, serta penyampaian beragam permasalahan pendidikan yang ditemukan di lingkungan masyarakat. Koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga pendidikan diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan permasalahan yang berkaitan dengan pemerataan akses pendidikan. Permasalahan tersebut dapat meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, distribusi tenaga pendidik, keterbatasan ekonomi keluarga, serta kendala dalam memperoleh informasi mengenai program bantuan pendidikan.

Penelitian Meiynana & Machdum (2020) menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon didukung oleh koordinasi antarpihak secara berjenjang dan birokrasi yang menjalankan fungsi sesuai peran masing-masing. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa koordinasi dan pembagian tanggung jawab merupakan unsur penting dalam mendukung keberhasilan program pendidikan. Sementara itu, penelitian Sitorus (2019) menunjukkan bahwa struktur birokrasi memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan pendidikan. Hal tersebut memperkuat pandangan bahwa pembagian tugas dan cara kerja kerja antarinstansi perlu disusun secara jelas agar pelaksanaan kebijakan tidak mengalami hambatan akibat tumpang tindih kewenangan maupun lemahnya koordinasi. Maka dari itu, struktur birokrasi dalam penelitian ini perlu dianalisis berdasarkan kejelasan pembagian tugas, mekanisme koordinasi, prosedur pelaksanaan program, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan. Dengan adanya struktur birokrasi yang jelas dan koordinasi yang baik, pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah diharapkan dapat berjalan lebih efektif dalam meningkatkan pemerataan akses pendidikan di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan pemerataan akses pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat yang berasal dari lingkungan pemerintah, pelaksana kebijakan, lembaga pendidikan, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dalam sudut pandang teori George C. Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan dapat dianalisis melalui empat aspek, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan pemerataan akses pendidikan di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan meliputi dukungan dan komitmen pemerintah daerah, ketersediaan program bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP), koordinasi dan kerja sama

antarlembaga, partisipasi masyarakat, serta ketersediaan lembaga pendidikan yang mudah dijangkau. Dukungan pemerintah melalui penyusunan program, pengalokasian anggaran, penyediaan fasilitas, dan pengawasan, disertai keterlibatan orang tua serta masyarakat, diharapkan dapat memperluas kesempatan anak usia sekolah dalam memperoleh pendidikan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Meiynana dan Machdum (2020) yang menunjukkan bahwa komunikasi yang baik, koordinasi berjenjang, ketersediaan sumber daya, dan pelaksanaan fungsi birokrasi merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan Program Indonesia Pintar.

Dari perspektif lain, implementasi kebijakan pemerataan akses pendidikan juga menghadapi berbagai faktor penghambat, seperti keterbatasan ekonomi masyarakat, kurang memadainya sarana dan prasarana pendidikan, kesenjangan akses informasi, keterbatasan tenaga pendidik, koordinasi antarlembaga yang belum optimal, serta ketidaktepatan sasaran penerima bantuan pendidikan. Keterbatasan ekonomi dapat mengakibatkan keluarga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak, sedangkan kurangnya fasilitas dan tenaga pendidik dapat memengaruhi pemerataan kualitas pelayanan pendidikan. Di samping itu, sosialisasi yang belum menyeluruh dapat menyebabkan masyarakat tidak memperoleh informasi mengenai persyaratan dan mekanisme bantuan pendidikan. Ketidaktepatan pendataan penerima bantuan serta lemahnya pengawasan juga berpotensi mengakibatkan program tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Radja, Tamelan, & Balun (2026) yang menemukan adanya hambatan berupa ketidaktepatan sasaran bantuan, lemahnya pengawasan, sosialisasi yang belum optimal, kendala administratif, dan keterbatasan infrastruktur. Sementara itu, penelitian Marina (2016) di Kecamatan Bangkalan menunjukkan bahwa kurang optimalnya sosialisasi dan pendistribusian program menyebabkan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan belum sepenuhnya memperoleh kegunaan program.

Berdasarkan uraian tersebut, faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pemerataan akses pendidikan perlu dianalisis selanjutnya dengan memakai empat aspek teori George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut menjadi landasan untuk mengidentifikasi sejauh mana dukungan pemerintah daerah, ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, serta mekanisme koordinasi dan pembagian tugas berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji faktor-faktor yang benar-benar ditemukan di lapangan melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi, sehingga dapat didapatkan gambaran yang lebih mendalam mengenai kondisi yang mendukung maupun menghambat usaha pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan.

Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pemerataan Akses Pendidikan

Pemerataan akses pendidikan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh pelayanan pendidikan tanpa membedakan kondisi sosial, ekonomi, maupun wilayah tempat tinggal. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah perlu memperhatikan berbagai permasalahan yang dapat memengaruhi kemampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan. Penelitian Meiynana & Machdum (2020) menunjukkan bahwa keberhasilan Program Indonesia Pintar didukung oleh komunikasi dan koordinasi yang baik, ketersediaan sumber daya, serta pelaksanaan birokrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sementara itu, penelitian Radja, Tamelan, & Balun (2026) menekankan pentingnya kenaikan kualitas pendataan, pengawasan, dan koordinasi antarpemangku kepentingan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program bantuan pendidikan. Kedua penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa pemerataan akses pendidikan membutuhkan upaya

yang tidak hanya berorientasi pada penyediaan fasilitas, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan program dan ketepatan sasaran kebijakan. Matriks Analisis Hasil Penelitian
Berikut ringkasan kerangka analisis berdasarkan teori George C. Edward III.

Tabel 2.
Analisis Berdasarkan Teori

Indikator	Aspek yang Dianalisis	Hal yang Perlu Dibuktikan
Komunikasi	Sosialisasi dan penyampaian informasi	Sejauh mana masyarakat memahami kebijakan pendidikan
Sumber daya	Anggaran, guru, fasilitas	Kecukupan sumber daya pendidikan
Disposisi	Komitmen dan tanggung jawab	Keseriusan pelaksana menjalankan kebijakan
Struktur birokrasi	Koordinasi dan pembagian tugas	Efektivitas kerja sama antarinstansi

Berdasarkan kerangka analisis implementasi kebijakan George C. Edward III, implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan pemerataan akses pendidikan di Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, perlu dianalisis melalui empat aspek utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut saling berkaitan dan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Hal ini sejalan dengan penelitian Kurniawan, Sulistyowati, & Arif (2026) berjudul Education Policy Reform to Improve Education Quality and Equity in Probolinggo Regency, yang menjelaskan pentingnya reformasi kebijakan pendidikan dalam mengatasi kesenjangan akses layanan pendidikan, distribusi tenaga pendidik, ketersediaan infrastruktur, dan sumber daya digital. Selain itu, penelitian Arif, Kurniawan, & Sulistyowati (2026) mengenai ketimpangan sosial dan akses pendidikan di Kabupaten Tuban menunjukkan bahwa kondisi ekonomi keluarga, faktor geografis, serta ketersediaan sarana dan prasarana turut memengaruhi kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemerataan akses pendidikan tidak cukup hanya dilakukan melalui penyediaan lembaga pendidikan, tetapi juga harus didukung oleh ketersediaan tenaga pendidik yang memadai, sarana dan prasarana yang layak, bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, penyampaian informasi yang efektif, serta koordinasi antarlembaga yang baik. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan perlu melaksanakan kebijakan pemerataan akses pendidikan secara terarah, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan menggunakan perspektif George C. Edward III, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi sejauh mana komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan di Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan.

CONCLUSION

Berdasarkan temuan pembahasan mengenai Penerapan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menaikkan Pemerataan Akses Pendidikan di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, dapat disimpulkan bahwa pemerataan akses pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas asal daya manusia dan mewujudkan pelayanan pendidikan yang adil bagi seluruh masyarakat. Implementasi kebijakan pemerintah daerah tampak jelas melalui empat petunjuk teori George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari aspek komunikasi, pemerintah daerah perlu meningkatkan penyampaian informasi dan sosialisasi mengenai program pendidikan agar dapat dipahami oleh seluruh masyarakat. Dari aspek sumber

daya, dibutuhkan ketersediaan anggaran, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, serta fasilitas pendidikan yang memadai untuk menunjang tahapan pembelajaran. Dari aspek disposisi, keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada komitmen, sikap, dan tanggung jawab para pelaksana kebijakan dalam menyajikan pelayanan pendidikan secara adil dan merata. Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, diperlukan koordinasi dan kerja sama yang baik antara Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Dinas Pendidikan, Pemerintah Kecamatan Kamal, pemerintah desa, dan lembaga pendidikan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara berdaya guna. Di samping itu, pemerataan akses pendidikan juga perlu memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, jarak tempat tinggal menuju sekolah, serta ketersediaan fasilitas pendidikan agar seluruh anak usia sekolah memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Maka dari itu, pemerintah daerah diharapkan terus meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan pendidikan melalui pemerataan fasilitas sekolah, kenaikan kualitas dan distribusi tenaga pendidik, optimalisasi bantuan pendidikan, serta penguatan koordinasi antarlembaga. Dengan adanya komitmen dan kerja sama dari seluruh pihak, diharapkan pemerataan akses pendidikan di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan dapat terwujud secara terbaik akibatnya seluruh masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.

REFERENCES

Arif, A. Z. I., Kurniawan, S., & Sulistyowati, A. (2026). Ketimpangan Sosial dan Akses Pendidikan Kajian Analitis terhadap Problematika Pendidikan di Masyarakat Kabupaten Tuban. *Jurnal Inovasi Pendidikan dan Ilmu Sosial*, *4*(2), 32-51. https://doi.org/10.36636/23mjz385

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan. (2024). Kecamatan Kamal dalam angka 2024. BPS Kabupaten Bangkalan. Lihat publikasi BPS .

Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.

Fatin, H. Y. (2022). Implementasi kebijakan pemerataan pendidikan bagi anak miskin di RA Al-Amin, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan, 11*(3). https://doi.org/10.21831/sakp.v11i3.18056 .

Fauziah, N., & Permana, H. (2022). Pemerataan akses pendidikan sistem informasi manajemen pada lembaga pendidikan Islam. *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 10*(1), 59–74. https://doi.org/10.30603/tjmpi.v10i1.2538 .

Kurniawan, S., Sulistyowati, A., & Arif, A. Z. I. (2026). Education policy reform to improve education quality and equity in Probolinggo Regency. *Educational Management and Advancement Journal, 1*(2), 73–88. https://doi.org/10.67958/edumaj.v1i2.107

Marina, A. (2016). *Implementasi Program Kartu Sehati di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Provinsi Madura*. Skripsi, Universitas Gadjah Mada. Repositori Universitas Gadjah Mada .

Meiynana, & Machdum, S. V. (2020). Potensi pendukung pelaksanaan Program Indonesia Pintar: Studi kasus di Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan, 13*(2). https://doi.org/10.24832/jpkp.v13i2.381 .

Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, & Saldaña, Johnny. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd Edition)*. SAGE Publications.

Radja, E. A., Tamelan, A. C., & Balun, A. P. (2026). Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar dalam meningkatkan akses pendidikan. *Jurnal Publik, 20*(2), 191–199. https://doi.org/10.52434/jp.v20i02.718 .

Setiawan, E., Handayani, N., Setiyono, R., Hermansyah, H., Ahmad, A., & Widyatmike, W. (2024). Pemerataan akses pendidikan. *Jurnal Sadewa: Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran dan Ilmu Sosial, 2*(4), 29–38. https://doi.org/10.61132/sadewa.v2i4.1200 .

Sitorus, M. (2019). Pengaruh communication, resources, disposition, dan bureaucratic structure terhadap implementasi kebijakan pendidikan (Studi kasus pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten Tobasamosir). *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi, 4*(1). https://doi.org/10.31113/jia.v4i1.412

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Taufiq, M., Manaf, M., & Alimuddin, I. (2023). Zonasi sekolah dalam upaya pemerataan akses pendidikan: Analisis keruangan pada sebaran sekolah menengah atas di Kota Parepare. *Urban and Regional Studies Journal, 6*(1), 94–107. https://doi.org/10.35965/ursj.v6i1.3810 .

UNESCO. (2023). *Global education monitoring report 2023: Technology in education: A tool on whose terms?*. UNESCO. https://www.unesco.org/gem-report/en/publication/technology.

World Bank. (2023). *Indonesia economic prospects (IEP) June 2023: The invisible toll of COVID-19 on learning*. World Bank.